

Vol. 5 No. 1 (2024), Halaman 79-85



GEOGRAPHIA

Jurnal Pendidikan dan Penelitian Geografi

ISSN: 2774-6968

OPTIMALISASI PEMANFAATAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA LA'BO' KECAMATAN SANGGALANGI KABUPATEN TORAJA UTARA

Julien Biringan^{1*}, Arie Supriati²

^{1,2}Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Manado, Indonesia

Email: julienbiringan@unima.ac.id¹, arisupriati@unima.ac.id²

Website Jurnal: <http://ejurnal.unima.ac.id/index.php/geographia>



Akses dibawah lisensi CC BY-SA 4.0 <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

DOI: 10.53682/gjppg.v5i1.9696

(Diterima: 08-01-2024; Direvisi: 22-06-2024; Disetujui: 30-06-2024)

ABSTRACT

The research used an exploratory descriptive-qualitative approach, collecting data through interviews and documentation from La'bo' Village government agencies. Geographical characteristics influence the village's development, with agricultural land covering 39.6% of its area. Infrastructure development, including roads and highways, is crucial for community mobility. Village Funds (APBN) contributed 91.5% of total costs during 2019–2023. Road maintenance is the most expensive type, followed by concrete rebate and irrigation construction. Despite a decrease in funding due to the COVID-19 pandemic, economic recovery in 2021, 2022, and 2023 is expected to resume infrastructure development. The choice of materials and weather conditions also impact the construction and maintenance processes.

Keywords: *Infrastructure development, Village funds.*

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui optimalisasi pemanfaatan dana desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif eksploratif, pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi pada instansi pemerintah Desa La'bo'. Perkembangan desa dipengaruhi oleh karakteristik geografisnya, dengan luas lahan pertanian mencapai 39,6% dari luas wilayahnya. Pembangunan infrastruktur jalan berpengaruh bagi mobilitas masyarakat. Dana Desa (bersumber dari APBN) menyumbang 91,5% dari total biaya pembangunan desa selama 2019-2023. Pemeliharaan jalan merupakan pemanfaatan dana desa yang paling besar, disusul rabat beton dan irigasi. Meskipun terjadi penurunan pendanaan akibat pandemi Covid-19, pemulihan ekonomi pada tahun 2021, 2022, dan 2023

Kata Kunci: *Pembangunan infrastruktur, Dana Desa.*

PENDAHULUAN

Negara berperan dalam pembangunan daerah. Negara adalah sebuah afiliasi yang menjaga segala sesuatunya terkendali dalam

suatu ruang sesuai dengan seperangkat undang-undang umum yang memberikan kapasitas pemaksaan kepada masyarakat ([Agustinus, 2008](#); [Soehino, 2008](#)). Negara dibentuk karena

dipengaruhi oleh empat komponen penting, yaitu individu, wilayah, pemerintah, dan pengakuan dari berbagai negara. Pada konteks lokal geografis dan administrasi sebagai bentuk dari negara dan komponen pembangunan menjadi pemerintah daerah, wilayah administratif, dan masyarakat.

Pembangunan dengan konsep *bottom-up*, kapasitas kekuasaan dan pengambilan keputusan bersifat atas dasar kebutuhan masyarakat. Sehingga prinsip *bottom-up* mempunyai pengertian bahwa masyarakat merupakan sumber kedaulatan dan memiliki hak dalam menentukan arah kebijakan pembangunan wilayah. Oleh karenanya masyarakat memiliki hak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan pembangunan wilayah lokal. Pemerintah lokal, maka harus memiliki akuntabilitas dan transparansi terkait dengan pengelolaan pemerintahan dan sumber daya lokal. Partisipasi tersebut berupa pengambilan keputusan, pelaksanaan, hasil, dan evaluasi ([Dwijosusilo & Shafiyah, 2020](#)).

Konsep *bottom-up* dalam dana Desa merupakan pendekatan pembangunan atas dasar partisipasi dan kebutuhan desa. Masyarakat dilibatkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan monitoring. Partisipasi, keberpihakan dan keberlanjutan menjadi prinsip utama dalam penggunaan dana Desa. Dana Desa didasarkan atas desentralisasi dan otonomi daerah (UU No. 6. Tahun 2014). Sebelumnya pemerintah Desa menerima Alokasi Dana Desa (ADD) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera (APBN) dengan besaran minimal 10% dari transfer dana ke daerah dan desa (TKDD) dan mulai disalurkan tahun 2015. Tujuan dana Desa sebagai upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan desa, mewujudkan kemandirian desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa sehingga memperkecil kesenjangan antara kota dan desa dengan cara memberikan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa, membangun, membina, dan memberdayakan masyarakat desa berdasarkan kapasitas kekuasaan dan pengambilan keputusan bersifat atas dasar kebutuhan masyarakat. Pemberian otonomi desa tersebut berkonsekuensi pada kewenangan desa yang besar dalam mengatur keuangan ([Hardianti, 2017](#)).

Pembangunan desa sebagai bentuk perubahan bermanfaat menuju kerangka sosial

dan keuangan sesuai dengan kerangka pengelolaan lokal. Gagasan perubahan dalam konteks pembangunan desa mengkaraktirasi kemajuan mengkaraktirasi kemajuan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas manusia agar berdampak pada masa depan. Konsekuensi perbaikan berupa; (a) perbaikan berarti membangkitkan kapasitas manusia yang ideal, baik manusia maupun kelompok; (b) perbaikan berarti memberdayakan harmoni, korespondensi, dan perkembangan; (c) perbaikan mengandung arti memberdayakan dan membangun kepercayaan dalam mengarahkan diri sendiri sesuai dengan kapasitas yang dimiliki; (d) kepercayaan ini dikomunikasikan sebagai pintu terbuka yang setara, peluang mengambil keputusan, dan kemampuan untuk memilih; (e) perbaikan berarti mengurangi ketergantungan dan menjalin hubungan yang saling menguntungkan dan dihormati ([Siagian, 2008](#)). Peraturan Nomor 25 Tahun 2004 tentang Kerangka Penyusunan Pembangunan Masyarakat adalah suatu strategi penyusunan perbaikan yang terpadu untuk mewujudkan rencana kemajuan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh komponen organisasi daerah negara bagian dan daerah pada tingkat lokal dan teritorial.

Perbaikan diharapkan dapat menciptakan ekonomi sosial yang dapat dikelola dengan prinsip keadilan bagi seluruh wilayah setempat. Berikutnya adalah beberapa bagian penting dalam sudut pandang perbaikan khususnya pergantian peristiwa finansial, pergantian peristiwa fisik dan sosial, pergantian peristiwa alamiah, dan pergantian peristiwa kelembagaan ([Adisasmita, 2010](#); [Hamid, 2018](#); [Tarigan, 2004](#); [Todaro & Smith, 2006](#)). Komponen yang signifikan dan salah satu tujuan perbaikan adalah korespondensi atau pemerataan distributif. Perbaikan yang adil merupakan perspektif yang signifikan dalam memahami standar konstitusi dan hak-hak sipil. Komponen perbaikan yang adil mencakup program-program yang mendalam pemenuhan kebutuhan dasar secara kesempatan yang setara untuk memperoleh pendidikan dan pelayanan kesejahteraan ([Nitisastro, 2006](#)).

Infrastruktur desa berperan sebagai upaya meningkatkan aksesibilitas komponen-komponen perbaikan desa. Infrastruktur utama yang menjadi ciri desa adalah jalan dan irigasi. Keterhubungan wilayah dengan infrastruktur jalan dapat meningkatkan aksesibilitas.

Sedangkan irigasi sebagai infrastuktur pertanian berfungsi pengaliran air permukaan secara teratur dan merata bagi lahan pertanian sehingg dapat meningkatkan hasil panen dan masa tanam yang panjang. Selanjutn irigasi akan mendorong efesiensi penggunaan air permukaan, diversifikasi tanaman pertanian, ketahanan pangan dan perekonomian desa yang sebagai besar masyarakat sebagai petani. Pada akhirnya optimaliasi penggunaan dana Desa dalam peningkatan ekonomi desa perlu mempertimbangkan kapasitas kekuasaan dan pengambilan keputusan bersifat atas dasar kebutuhan masyarakat. Disamping itu juga memperhatikan ketepatan dalam kebijakan, pelaksanaan, target, dan tepat lingkungan ([Irmansyah et al., 2021](#)). Pengaruh dana desa pada pembangunan infastruktur sebagai penunjang jalannya ekonomi dan pengaruh dana desa pada pemberdayaan berupa peningkatan UKM, pengelolaan bank sampah dan pelatihan usaha ekonomi sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat ([Dydha, 2017](#)).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif eksploratif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Sumber informasi penting didapatkan dari informan yang berasal dari sejumlah perangkat pemerintah Desa La’bo’. Analisis data dengan tahapan penurunan informasi (*information decline*), pertunjukan informasi (*information show*), dan akhir gambar (*end drawing*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Geografis dan Demografis

Secara astronomis, desa La’bo’ terletak di 2°59’28" LS-3°1’27" LS dan 119°54’58"LS-119°58’4"LS. Sedangkan secara geografis berbatasan sebelah utara dengan desa Tandung Labo’, sebelah selatan dengan desa Buntu Labo’ dan Issong Kaluo’, sebelah timur dengan desa Buangin, dan sebelah barat dengan desa Pantanakan Lolo dan Paepalean. Luas desa La’bo’ yaitu 10,99 km² yang sebagian besar berupa semak belukar (43,9%), dan persawahan (39,6%), sisanya berupa hutan kering, perkebunan dan permukiman. Penggunaan lahan desa La’bo’ dapat diperinci pada [Tabel 1](#).

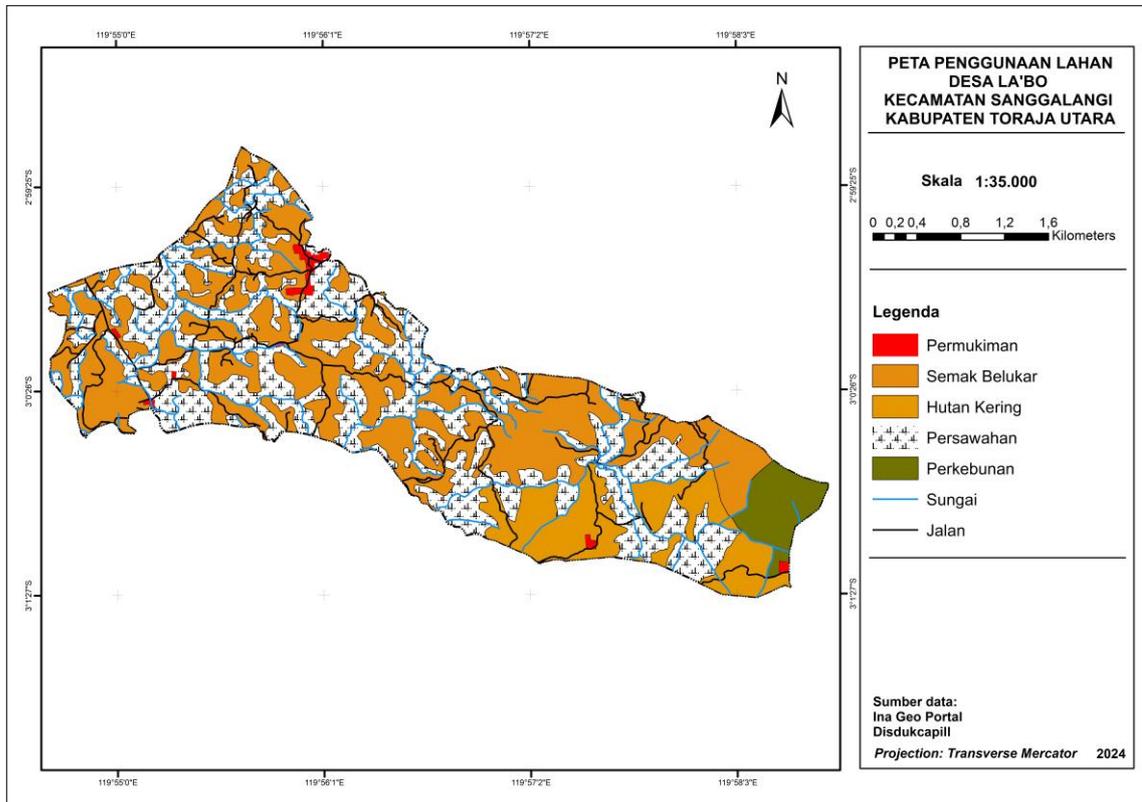
Tabel 1. Penggunaan Lahan Desa La’bo’

Penggunaan Lahan	Luas	%
Permukiman	0,09	0,8
Persawahan	4,35	39,6
Perkebunan	0,44	4,0
Hutan kering	1,29	11,7
Semak belukar	4,82	43,9
Jumlah	10,99	100,0

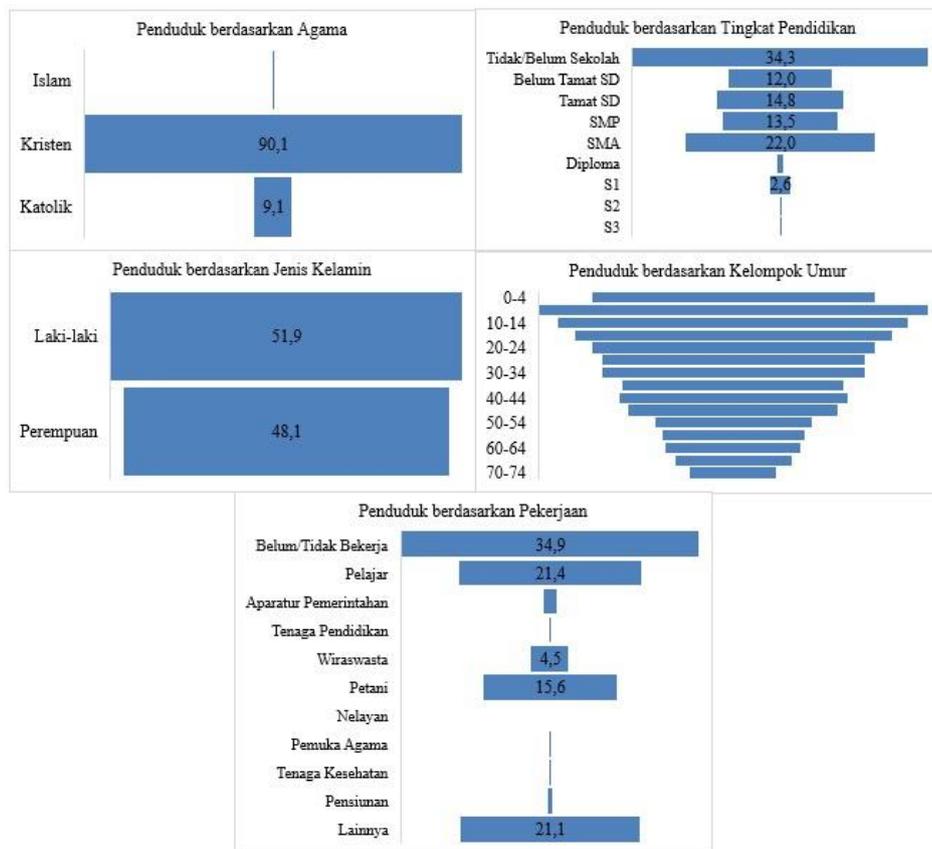
Sumber: BPS Kabupaten Toraja Utara, 2023.

Secara demografi pada [Gambar 2](#), berdasarkan agama penduduk didominasi oleh pemeluk kristen (90,1%) dan lainnya pemeluk Katolik dan Islam. Sebagian besar penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dikategorikan tidak/belum sekolah (34,3%). Tingkat pendidikan SMA (22%), lebih tinggi persentase dibanding tingkat SMA, SD, Diploma dan

Sarjana. Penduduk jenis kelamin laki-laki lebih banyak (51,9%) dibanding jenis kelamin perempuan. Terdapat penduduk yang belum/tidak bekerja (34,9%) mendominasi penduduk berdasarkan pekerjaan sehingga perlu perhatian khusus. Struktur penduduk didominasi penduduk usia muda yang merupakan potensi demografi yang besar.



Gambar 1. Peta Penggunaan Lahan Desa La'bo'



Gambar 2. Karakteristik Demografi Desa La'bo'

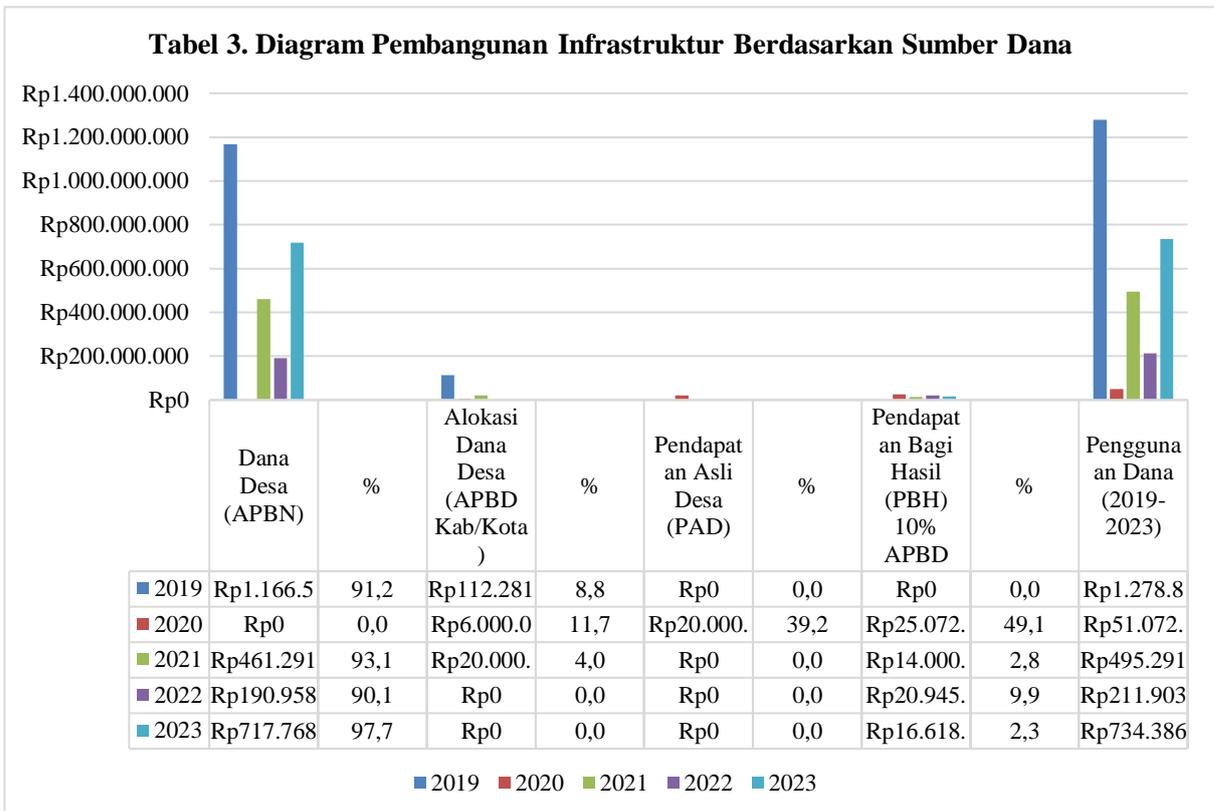
Optimasi Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur

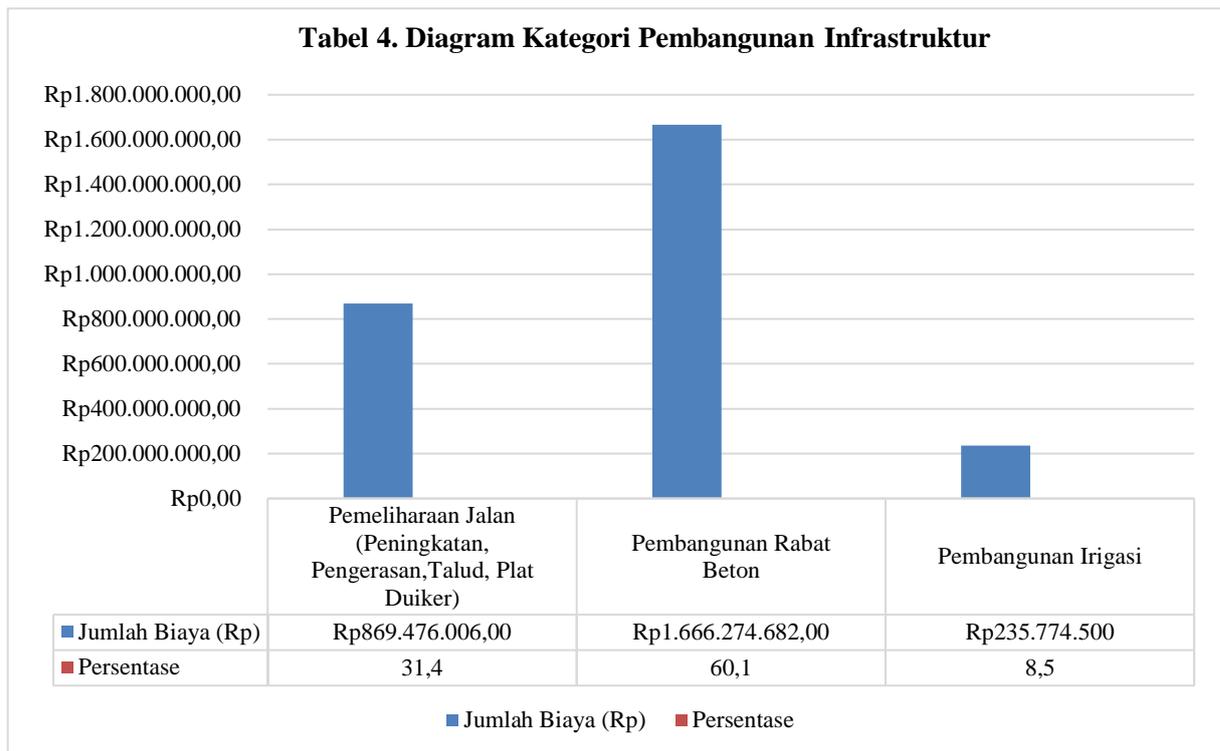
Pembangunan di desa La’bo’ didasarkan pada karakteristik geografis dilihat dari penggunaan lahan produktif yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat yaitu lahan pertanian (39,6%) dari luas desa La’bo’. Jalan sebagai aksesibilitas dan prasarana mobilitas juga diperhatikan sehingga pembangunan jalan dan rabat beton menjadi pertimbangan untuk dilaksanakan. Peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan dan irigasi dapat mempermudah aksesibilitas dan bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan. Pembangunan dengan penggunaan dana desa La’bo’ dapat dikatakan ketepatan dalam kebijakan, pelaksanaan, target, dan tepat lingkungan, hal tergambar pada pemerintah desa bijak dalam mengalokasikan dana sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan target pembangunan dan memperhatikan kondisi geografis yang merupakan penggunaan lahannya berupa pertanian sawah.

Berdasarkan Tabel 3. Dana Desa (APBN) merupakan sumber utama pendanaan desa, dengan persentase rata-rata 91,5% selama periode 2019-2023. Alokasi Dana Desa (APBD Kabupaten/Kota) memberikan kontribusi yang kecil, dengan persentase rata-rata 5% selama

periode 2019-2023. Pendapatan Asli Desa (PAD) dan Pendapatan Bagi Hasil (PBH) memberikan kontribusi yang sangat kecil. Prioritas utama penggunaan Dana Desa adalah untuk pembangunan infrastruktur. Pemeliharaan jalan merupakan jenis pembangunan infrastruktur yang paling banyak menelan biaya, yaitu Rp869.476.006,00 atau 31,4% dari total biaya pembangunan infrastruktur. Konstruksi rabat beton berada di urutan kedua, dengan biaya Rp1.666.274.682,00 atau 60,1% dari total biaya pembangunan infrastruktur. Pembangunan irigasi hanya menghabiskan 8,5% dari total biaya pembangunan infrastruktur, yaitu Rp235.774.500,00. Besarnya struktur pendanaan pembangunan infrastuktur yang berasal dari Dana Desa, menunjukkan bahwa Dana Desa bermanfaat bagi pembangunan Desa dan menjadi sumber dana pembangunan utama. Pada tahun 2020 terjadi penurunan dana untuk pembangunan infrastuktur dikarenakan terjadi pandemi Covid-19, sehingga pemerintah mengalihkan untuk penanganan kesehatan terkait pandemi, dan bantuan tunai, dan pada tahun 2021, 2022, dan 2023 terjadi pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 sehingga pembangunan infrastuktur dapat dilaksanakan kembali.

Tabel 3. Diagram Pembangunan Infrastruktur Berdasarkan Sumber Dana





Dalam pertemuan dengan Bapak Yohanis Tangke Tasikrede, Kepala Desa La'bo', pembangunan infrastruktur telah mengalami kemajuan yang signifikan, termasuk pembangunan jalan. Bapak Frengky Garonga, kepala urusan pembangunan, perbaikan jalan dapat memudahkan mobilitas masyarakat. Wendi, kepala urusan keuangan menyatakan perbaikan infrastruktur dapat memberi kemajuan efektif bagi kesejahteraan masyarakat. Selain pembangunan infrastruktur fisik seperti pemeliharaan jalan, peningkatan kapasitas jalan, pengerasan, pembangunan talud dan plat duiker, pembangunan rabat beton, dan pembangunan irigasi terungkap bahwa tidak hanya infrastruktur fisik saja, tetapi pembangunan sosial seperti pembangunan taman kanak-kanak/PAUD. Sejalan dengan penelitian lain, bahwa dana desa berdampak pada peningkatan pembangunan infrastuktur di desa (Kurniawan, 2021).

Pemilihan material dalam kontruksi jalan dan rabat yang baik berpengaruh terhadap ketahan struktur jalan dan rabat. Material yang digunakan sebagian besar batu gunung, sirtu gunung, beton, pasir, batu pecah, besi, dan kawat. Kondisi cuaca terutama curah hujan juga berdampak terhadap proses pembangunan, dan pemeliharaan. Pencegahan tanah longsor dan banjir perlu diperhatikan untuk menjaga

struktur jalan, rabat beton, dan irigasi tidak cepat rusak. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya bahwa kontruksi bangunan kurang baik akan mempengaruhi keawetan infrastuktur (Mamonto et al., 2018).

KESIMPULAN

Perkembangan desa La'bo' dipengaruhi oleh karakteristik geografisnya, dimana luas lahan pertanian mencapai 39,6% dari luas wilayahnya. Jalan dan infrastruktur, seperti jalan raya dan irigasi, dipertimbangkan karena aksesibilitas dan manfaat kesejahteraannya. Dana Desa (APBN) merupakan sumber utama pendanaan desa yang menyumbang 91,5% dari total biaya selama periode 2019-2023. Pemeliharaan jalan merupakan jenis pembangunan infrastruktur yang paling mahal, yaitu sebesar 31,4% dari total biaya. Konstruksi rabat beton merupakan biaya termahal kedua, yaitu sebesar 60,1% dari total biaya. Pembangunan irigasi hanya memakan 8,5% dari total biaya.

Meskipun terjadi penurunan pendanaan akibat pandemi Covid-19 pada tahun 2020, pemulihan ekonomi pada tahun 2021, 2022, dan 2023 memungkinkan pembangunan infrastruktur kembali dilanjutkan. Pembangunan infrastruktur mengalami kemajuan yang signifikan, termasuk

pembangunan jalan yang dapat memperlancar mobilitas masyarakat. Pemilihan material dalam konstruksi jalan dan potongan harga juga mempengaruhi ketahanannya. Kondisi cuaca, khususnya curah hujan, juga mempengaruhi proses konstruksi dan pemeliharaan. Pencegahan tanah longsor dan banjir sangat penting untuk mencegah kerusakan pada struktur jalan, pelat beton, dan irigasi.

SARAN

Penguatan infrastruktur desa melalui peningkatan pembangunan jalan, sistem drainase, dan akses internet dapat meningkatkan mobilitas masyarakat dan pembangunan ekonomi. Pelatihan dan pendidikan bagi petani, UMKM, dan tenaga kesehatan dapat meningkatkan kapasitas masyarakat. Meningkatkan kerja sama antar lembaga pemerintah, keterlibatan masyarakat, dan kemitraan dengan sektor swasta dapat menarik investasi dan sumber daya.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, R. 2010. *Teori Pertumbuhan Kota*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Agustinus, L. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Dwijosusilo, K., & Shafiyah, S. 2020. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur di Desa Klobur Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 4(2), 143–156.

Dydha, D. O. 2017. *Analisis Pengaruh Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Randuagung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik)*. Universitas Brawijaya.

Hamid, H. 2018. *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. Makassar: De La Macca.

Hardianti, S. 2017. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Desa (Program Alokasi Dana Desa di Desa Buntongi Kecamatan Ampana Kota). *Katalogis*, 5(1).

Irmansyah, I., Mustafa, S. W., & Hamid, R. S. 2021. Efektivitas Kebijakan Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 4(2), 1086–1095.

Kurniawan, K. 2021. Evaluasi Dampak Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa di Indonesia. *FORUM EKONOMI: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 23(3), 513–522.

Mamonto, N., Sumampow, I., & Undap, G. 2018. Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw II Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).

Nitisastro, W. 2006. *Population Trends in Indonesia*. Sheffield: Equinox Publishing.

Siagian, S. P. 2008. *Manajemen Sumber Daya manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Soehino. 2008. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.

Tarigan, R. 2004. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.